

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH  
PERIODE TAHUN 2006-2016**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Ratna Ayu Kusumaningrum

Nomor Mahasiswa : 14313346

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

**2018**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERIODE TAHUN 2006-2016**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi,

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Ratna Ayu Kusumaningrum

Nomor Mahasiswa : 14313346

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

**2018**

### HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Oktober 2018

Penulis



Ratna Ayu Kusumaningrum

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH**

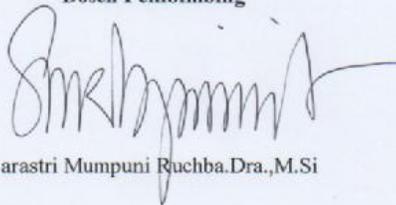
PERIODE TAHUN 2006-2016

Nama : Ratna Ayu Kusumaningrum  
Nomor Mahasiswa : 14313346  
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 18 Oktober 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

**Dosen Pembimbing**



Sarastri Mumpuni Ruchba.Dra.,M.Si

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2006-2016**

Disusun Oleh : **RATNA AYU KUSUMANINGRUM**

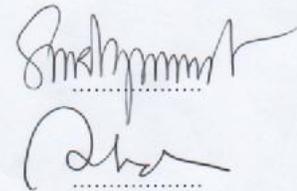
Nomor Mahasiswa : **14313346**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 15 Oktober 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sarastri Mumpuni R, Dra., M.Si

Penguji : Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sa'yana, SE., M.Si, Ph.D.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala curahan rahmat dan karuniaNya lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan secara khusus kepada :

**Ibunda tercinta Puji Windarsih**, yang telah memberikan semangat dan doa serta dukungan baik secara material maupun non material.

**Adik Tercinta Jihan Aditya**, yang telah memberikan semangat dan doa kepada saya.

**Yosafat Ardyanto**, yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi yang tiada hentinya.

**Ibu Sarastri Mumpuni Ruchba.Dra.,M.Si**, yang telah membimbing saya dengan sabar.

**Pak Anjar**, yang telah membantu saya dan mendukung saya.

**Tutur Rizki**, yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Dan segenap teman-teman dan keluarga saya yang telah mendukung dan mendoakan saya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2016”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk dan syafa’at kepada umat sehingga terlepas dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini dengan baik berkat doa, dukungan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
1.3.1 Tujuan .....	14
1.3.2 Manfaat .....	15
1.4 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b> .....	18
2.1 Kajian Pustaka .....	18

2.2 Landasan Teori .....	23
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia .....	23
2.2.2 .....	25
2.2.3 Jumlah Penduduk Miskin.....	28
2.2.4 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan .....	29
2.2.5 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan.....	29
2.3 Kerangka Pemikiran .....	30
2.4 Hipotesis Penelitian.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data .....	32
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	32
3.2.1 Variabel Dependen .....	33
3.2.2 Variabel Independen .....	33
3.3 Metode Analisis Data .....	35
3.4 Pemilihan Metode Estimasi.....	37
3.4.1 Uji F ( <i>Chow Test</i> ) .....	38
3.4.2 Uji Hausman .....	39
3.5 Uji Statistik.....	39
3.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	39
3.5.2 Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) .....	40
3.5.3 Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) .....	40

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	42
4.1 Deskripsi Data Penelitian .....	42
4.1.1 Analisis Deskripsi Data Penelitian .....	42
4.2 Hasil dan Analisis Data .....	43
4.2.1 Uji Chow Test.....	44
4.2.2 Uji Hausman Test .....	44
4.3 Hasil Uji Statistik .....	46
4.3.1 Koefisien Determinasi (R-square) .....	46
4.3.2 Uji f.....	47
4.3.3 Uji t.....	47
4.4 Intepretasi Hasil.....	49
4.5 Pembahasan .....	50
<b>BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI</b> .....	53
5.1 Simpulan.....	53
5.2 Implikasi .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	56
<b>LAMPIRAN</b> .....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 IPM Pulau Jawa Periode Tahun 2006-2016 ( Persen) .....	6
Tabel 1.2 Rata-rata IPM di Provinsi Jawa Tengah per Kabupaten/Kota Periode Tahun 2006-2016 ( Persen).....	6
Tabel 1.3 Rata-rata Tingkat Lama Sekolah di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2006-2016 (Tahun) .....	8
Tabel 1.4 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Provinsi Jawa Tengah per Kabupaten/Kota Periode Tahun 2006-2016 ( Ribuan).....	9
Tabel 1.5 Rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah per Kabupaten/Kota Periode Tahun 2006-2016 ( Tahun) .....	11
Tabel 2.1 Jurnal-jurnal dan Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 4.1 Hasil Pengujian <i>Chow Test</i> .....	44
Tabel 4.2 Hasil Pengujian <i>Hausman Test</i> .....	45
Tabel 4.3 Hasil Regresi Random Effect.....	45
Tabel 4.4 Uji t .....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN .....	59
Lampiran I. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah, 2006-2016 (Persen) .....	60
Lampiran II. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Juta Rupiah), 2006 – 2016.....	62
Lampiran III. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2006-2016 (Ribu Jiwa) .....	65
Lampiran IV. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan per Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2006- 2016 (Juta Rupiah).....	68
Lampiran V. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan per Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2016 (Juta Rupiah) .....	70
Lampiran VI. Uji <i>Chow Test</i> .....	73
Lampiran VII. Uji <i>Hausman Test</i> .....	75
Lampiran VIII. <i>Random Effect</i> .....	77

## HALAMAN ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, jumlah penduduk miskin, jumlah pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah dalam periode waktu tahun 2006-2016. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode data panel yang diolah oleh aplikasi *E Views 9*. Data yang digunakan diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik. Estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Random Effect* dengan hasil PDRB tidak signifikan, sedangkan jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan signifikan terhadap IPM Provinsi Jawa Tengah.

**Kata kunci:** IPM, PDRB, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, pemerintah sedang meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Pembangunan infrastruktur juga harus diimbangi dengan pembangunan manusia yang menjadi modal penting dalam pembangunan ekonomi di suatu negara. Pembangunan manusia (*human development*) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UDNP, 1990). Pembangunan secara tradisional merupakan kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama menuju peningkatan pendapatan nasional atau GNI (*Gross National Income*) tahunan (Todaro, 2006: 19).

Keberadaan manusia menjadi tema sentral dalam setiap program pencapaian pembangunan. Skala internasional dikenal dengan tujuan pembangunan milenium (MDG's), yang disepakati oleh pemimpin dunia dalam KTT 2000. MDG's merupakan komitmen masyarakat internasional, khususnya negara yang sedang berkembang. Visi tersebut secara kuat menempatkan pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Pembangunan secara nasional beberapa tahun

belakangan banyak program kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan pengentasan kondisi sosial dan ekonomi. Kebijakan tersebut sesuai dengan rekomendasi *United Nations Development Programme* (UNDP). Pembangunan secara eksplisit UNDP menyarankan bahwa Indonesia perlu memberikan prioritas investasi yang tinggi pada upaya pembangunan manusia dan pembiayaan (BPS, 2007).

Pembangunan harus mencerminkan perubahan total dari suatu masyarakat secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya. Pembangunan merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat secara berkelanjutan dalam jangka panjang (Sadono, 2010: hal.11). Pembangunan yang berkembang selama ini merupakan pembangunan ekonomi yang dapat diukur melalui pembangunan manusia (*human development*). Pembangunan manusia menekankan terpenuhinya kehidupan yang layak bagi manusia, sehingga pembangunan manusia menjadikan manusia sebagai tujuan akhir tetapi manusia bukanlah sebagai alat pembangunan (Sadono, 2010: hal.11).

Pembangunan manusia pada dasarnya mempunyai empat komponen utama yaitu produktifitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Melalui peningkatan keempat komponen tersebut secara maksimal maka pembangunan manusia akan berhasil dengan baik yang dicirikan oleh peran manusia sebagai agen pembangunan yang efektif. Pencapaian pembangunan manusia yang baik maka penduduk suatu negara

harus memiliki peluang berumur panjang dan sehat, memiliki tingkat pendidikan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif sehingga dapat memiliki pendapatan yang cukup baik dan memiliki daya beli dan kemauan untuk melakukan konsumsi bagi pemenuhan kebutuhan (Feriyanto, 2014: hal. 217).

Tolak ukur untuk melihat kualitas hidup manusia adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI). IPM dapat diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM berkisar antara 0-100 dengan rincian IPM yang lebih kecil dari 50 maka masuk kategori rendah, IPM dari 50 sampai 80 termasuk kategori sedang atau menengah dan IPM dari 80 keatas termasuk kategori tinggi (Mirza, 2012: hal.2).

*Human Development Report* (UNESCO, 2007) menjelaskan beberapa asumsi dasar bahwa manusia yang berkualitas adalah manusia yang dapat hidup sehat dan panjang umur, sebagaimana diukur dengan Angka Harapan Hidup sejak waktu lahir manusia memiliki kecakapan dan pendidikan yang diperlukan bagi hidupnya, sebagaimana diukur melalui indikator angka literasi orang dewasa dengan bobot penilaian dua pertiga, serta indikator angka literasi kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan bobot penilaian satu pertiga dari perhitungan indeks pendidikan.

IPM dapat dihitung setiap tahun. Manfaat dari perhitungan IPM adalah untuk perbandingan relatif kinerja antar daerah di Indonesia sehingga dapat menentukan peringkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam keberhasilan pembangunan manusia antar wilayah, untuk mengetahui perkembangan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah baik secara total (IPM) ataupun indeks masing-masing komponen IPM, sebagai dasar kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah agar terpacu meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan penentuan prioritas program peningkatan kualitas hidup manusia, sebagai kriteria untuk menentukan besarnya pendanaan pembangunan manusia dari pusat ke daerah, sebagai indikator untuk mengukur kinerja kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terkait (Feriyanto, 2014).

Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan, banyaknya negara maju yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti penyalahgunaan obat terlarang, alkohol, AIDS, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki secara bijaksana untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia (UNDP, 1990).

Hal tersebut menjadi dasar pentingnya pembangunan manusia, dimana dalam pembangunan manusia tidak hanya meliputi dimensi kesejahteraan saja melainkan

terkait juga dengan peningkatan kapasitas dasar manusia melalui akses terhadap pendidikan dan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang publik (UNDP, 1990).

Pulau yang tergolong padat penduduk adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa terbagi menjadi 6 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Banten. DKI Jakarta dengan luas wilayah seribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk 10 juta jiwa, Jawa Barat memiliki luas wilayah 35 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk 43 juta jiwa, Jawa Tengah memiliki luas wilayah 34 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk 32 juta jiwa, Jawa Timur memiliki luas wilayah 47 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 37 juta jiwa, DI Yogyakarta memiliki luas wilayah 3 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk 3,3 juta jiwa dan Banten memiliki luas wilayah 10 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk 10 juta orang. Hal tersebut tentunya membuat IPM di setiap provinsi di Pulau Jawa berbeda-beda (BPS, 2017).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata IPM di Pulau Jawa tergolong pada kategori sedang. IPM provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan di tahun 2006-2008 dari mula-mula sebesar 69,80% menjadi 71,60%, karena beberapa faktor IPM provinsi Jawa Tengah turun drastis di tahun 2010 menjadi 66,08%. Setelah itu IPM provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan hingga tahun 2016.

**Tabel 1.1**

**IPM Pulau Jawa Periode Tahun 2006-2016 ( Persen)**

<b>Provinsi</b>	<b>2006</b>	<b>2008</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>2016</b>	<b>Rata-rata</b>
DKI Jakarta	76,33	77,03	77,60	78,33	78,39	79,60	77,89
Jawa Barat	70,32	71,12	72,29	73,11	68,80	70,05	71,26
Jawa Tengah	69,80	71,60	66,08	67,21	68,78	69,49	69,65
DI Yogyakarta	73,70	74,88	75,77	76,75	76,81	78,38	76,09
Jawa Timur	69,18	70,38	71,62	72,83	68,14	69,74	70,67
Banten	69,11	69,70	70,48	71,49	69,89	70,96	70,37

**Sumber: BPS Indonesia, 2017**

Tabel 1.2, menunjukkan IPM per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2006-2016 yang setiap tahunnya mengalami perubahan. Rata-rata IPM per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang tertinggi diraih oleh Kota Surakarta dengan rata-rata IPM sebesar 78,28%. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan perolehan IPM terendah di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Brebes yaitu sebesar 66,43%. IPM setiap Kabupaten/Kota termasuk dalam golongan IPM sedang (BPS, 2017).

**Tabel 1.2**

**Rata-rata IPM di Provinsi Jawa Tengah per Kabupaten/Kota Periode Tahun 2006-2016 ( Persen)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>
Kabupaten Cilacap	70,49	Kabupaten Kudus	72,50
Kabupaten Purbalingga	71,11	Kabupaten Jepara	71,57
Kabupaten Banyumas	70,84	Kabupaten Demak	71,39
Kabupaten Banjarnegara	68,16	Kabupaten Semarang	73,27

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>
Kabupaten Kebumen	69,65	Kabupaten Temanggung	71,88
Kabupaten Purworejo	71,53	Kabupaten Kendal	69,83
Kabupaten Wonosobo	68,91	Kabupaten Batang	68,71
Kabupaten Magelang	70,60	Kabupaten Pekalongan	69,96
Kabupaten Boyolali	70,77	Kabupaten Pemalang	67,58
Kabupaten Klaten	73,43	Kabupaten Tegal	68,86
Kabupaten Sukoharjo	73,56	Kabupaten Brebes	66,43
Kabupaten Wonogiri	70,19	Kota Magelang	76,42
Kabupaten Karanganyar	73,32	Kota Surakarta	78,28
Kabupaten Sragen	70,35	Kota Salatiga	77,38
Kabupaten Grobogan	69,89	Kota Semarang	77,85
Kabupaten Blora	69,11	Kota Pekalongan	73,62
Kabupaten Rembang	70,58	Kota Tegal	73,37
Kabupaten Pati	71,55		

Sumber: **BPS, 2017**

Tingginya IPM dapat dipengaruhi oleh tingginya tingkat lama sekolah dalam hal tersebut masuk dalam kategori pendidikan. Pendidikan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap perkembangan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan sikap dan produktivitas sehingga pendidikan mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas.

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan di provinsi Jawa Tengah periode 2006-2016 selalu mengalami kenaikan. Rata-rata tingkat pendidikan tertinggi diperoleh Kota Surakarta dengan perolehan rata-rata pendidikan sebesar 11,34 artinya rata-rata penduduk menempuh pendidikan selama 11,34 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA, sedangkan rata-rata tingkat pendidikan terendah

diperoleh Kabupaten Brebes dengan perolehan rata-rata tingkat pendidikan sebesar 7,22 artinya rata-rata penduduk Kabupaten Brebes menempuh pendidikan selama 7,22 tahun atau setara dengan pendidikan SMP kelas 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah belum merata karena rata-rata tertinggi dan terendah terpaut cukup jauh.

**Tabel 1.3**

**Rata-rata Tingkat Lama Sekolah di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2006-2016 (Tahun)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>
Kabupaten Cilacap	8,27	Kabupaten Kudus	9,42
Kabupaten Banyumas	8,95	Kabupaten Jepara	8,70
Kabupaten Purbalingga	8,17	Kabupaten Demak	8,67
Kabupaten Banjarnegara	7,53	Kabupaten Semarang	9,00
Kabupaten Kebumen	8,31	Kabupaten Temanggung	8,26
Kabupaten Purworejo	9,11	Kabupaten Kendal	8,37
Kabupaten Wonosobo	7,72	Kabupaten Batang	7,66
Kabupaten Magelang	8,59	Kabupaten Pekalongan	8,11
Kabupaten Boyolali	8,56	Kabupaten Pemalang	7,81
Kabupaten Klaten	9,34	Kabupaten Tegal	7,95
Kabupaten Sukoharjo	9,74	Kabupaten Brebes	7,22
Kabupaten Wonogiri	7,95	Kota Magelang	10,99
Kabupaten Karanganyar	9,07	Kota Surakarta	11,34
Kabupaten Sragen	8,31	Kota Salatiga	11,18
Kabupaten Grobogan	8,23	Kota Semarang	11,19
Kabupaten Blora	7,78	Kota Pekalongan	9,65

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>
Kabupaten Rembang	8,17	Kota Tegal	9,33
Kabupaten Pati	8,21		

Sumber: **BPS, 2017**

Selain tingkat pendidikan, pengeluaran perkapita juga mempengaruhi tingginya IPM. Pengeluaran perkapita mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingginya pengeluaran perkapita maka daya beli masyarakat juga tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2006-2016 tertinggi diraih oleh Kota Salatiga dengan rata-rata yang diperoleh sebesar 4.435,55 ribu rupiah/orang/tahun. Sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita terendah diraih oleh Kabupaten Pemalang yaitu sebesar 2.419,29 ribu rupiah/orang/tahun. Semakin tinggi pengeluaran perkapita artinya semakin besar pula peluang penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

**Tabel 1.4**

**Rata-rata Pengeluaran per Kapita Provinsi Jawa Tengah per Kabupaten/Kota  
Periode Tahun 2006-2016 ( Ribuan)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>
Kabupaten Cilacap	3016,65	Kabupaten Kudus	3249,29
Kabupaten Banyumas	3209,09	Kabupaten Jepara	3040,87
Kabupaten Purbalingga	2880,32	Kabupaten Demak	2958,76

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>
Kabupaten Banjarnegara	2643,63	Kabupaten Semarang	3412,77
Kabupaten Kebumen	2645,99	Kabupaten Temanggung	2736,07
Kabupaten Purworejo	3005,61	Kabupaten Kendal	3296,26
Kabupaten Wonosobo	3103,08	Kabupaten Batang	2713,32
Kabupaten Magelang	2693,94	Kabupaten Pekalongan	2960,58
Kabupaten Boyolali	3685,25	Kabupaten Pemalang	2419,29
Kabupaten Klaten	3502,22	Kabupaten Tegal	2748,24
Kabupaten Sukoharjo	3300,07	Kabupaten Brebes	2899,31
Kabupaten Wonogiri	2764,74	Kota Magelang	3401,51
Kabupaten Karanganyar	3336,33	Kota Surakarta	4146,87
Kabupaten Sragen	3547,61	Kota Salatiga	4435,55
Kabupaten Grobogan	3026,38	Kota Semarang	4133,55
Kabupaten Blora	2837,55	Kota Pekalongan	3553,17
Kabupaten Rembang	2973,94	Kota Tegal	3664,94
Kabupaten Pati	3017,26		

Sumber: **BPS, 2017**

Komponen pembentuk IPM lainnya adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup ini merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah terkait pada tingkat kesehatan masyarakat (Feriyanto, 2014: hal.218).

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya selama periode tahun 2006-2016. Rata-rata angka harapan hidup tertinggi di peroleh oleh Kabupaten Pati dengan rata-rata angka harapan hidup sebesar 73,56 tahun, artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Pati dapat bertahan hidup hingga usia 73,56 tahun. Sedangkan rata-rata angka harapan hidup terendah diperoleh Kabupaten Brebes dengan rata-rata angka harapan hidup sebesar 67,68 tahun, artinya rata-rata penduduk Kabupaten Brebes dapat bertahan hidup hanya sampai usia 67,68 tahun.

**Tabel 1.5**

**Rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah per Kabupaten/Kota  
Periode Tahun 2006-2016 ( Tahun)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>
Kabupaten Cilacap	71,28	Kabupaten Kudus	71,45
Kabupaten Banyumas	70,65	Kabupaten Jepara	72,10
Kabupaten Purbalingga	70,83	Kabupaten Demak	72,22
Kabupaten Banjarnegara	70,21	Kabupaten Semarang	73,29
Kabupaten Kebumen	70,26	Kabupaten Temanggung	73,27
Kabupaten Purworejo	71,39	Kabupaten Kendal	69,87
Kabupaten Wonosobo	70,15	Kabupaten Batang	71,22
Kabupaten Magelang	70,99	Kabupaten Pekalongan	70,10
Kabupaten Boyolali	71,79	Kabupaten Pemalang	69,00
Kabupaten Klaten	72,82	Kabupaten Tegal	69,24
Kabupaten Sukoharjo	72,20	Kabupaten Brebes	67,68
Kabupaten Wonogiri	73,26	Kota Magelang	71,97

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata</b>
Kabupaten Karanganyar	73,48	Kota Surakarta	73,47
Kabupaten Sragen	73,25	Kota Salatiga	72,55
Kabupaten Grobogan	70,92	Kota Semarang	73,50
Kabupaten Blora	72,01	Kota Pekalongan	71,30
Kabupaten Rembang	71,22	Kota Tegal	70,15
Kabupaten Pati	73,56		

Sumber: **BPS, 2017**

Faktor yang diduga mempengaruhi IPM adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jumlah PDRB akan mengubah konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Daya beli masyarakat dalam membeli suatu barang berkaitan dengan IPM yaitu indikator pendapatan (Todaro: 2006). Faktor lain yang mempengaruhi IPM adalah jumlah penduduk miskin, dimana kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Faktor lain yang mempengaruhi IPM adalah jumlah pelayanan kesehatan seperti pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dimana dengan banyaknya banyaknya anggaran untuk kesehatan maka kebutuhan kesehatan masyarakat akan lebih terpenuhi.

IPM Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun dalam periode tahun 2006-2016 selalu berfluktuatif, rata-rata IPM di provinsi Jawa Tengah lebih besar dari IPM di Provinsi Jawa Timur merujuk mengapa IPM Provinsi Jawa Tengah lebih besar dari

IPM provinsi Jawa Timur sedangkan provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah yang lebih lebar dibandingkan provinsi Jawa Tengah maka muncul ide penulis untuk menuliskan karya ilmiah dengan judul “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi IPM di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2006-2016”. Faktor yang diduga mempengaruhi IPM di Provinsi Jawa Tengah antara lain: PDRB Provinsi Jawa Tengah, Jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimanakah pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan Provinsi Jawa Tengah terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan provinsi jawa tengah terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah?
5. Bagaimanakah pengaruh PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dan

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan secara bersama-sama terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat diuraikan tujuan yang ingin dicapai dalam membuat laporan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000 terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan di Provinsi Jawa Tengah terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.
- d. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan Provinsi Jawa Tengah terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.
- e. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, jumlah penduduk miskin, jumlah pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan secara bersama-sama terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.

### **1.3.2 Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini antara lain:

a. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang sama.

b. Manfaat secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat lebih memperhatikan pembangunan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan wilayahnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Susunan bab pada penelitian ini terdiri dari Pendahuluan, Kajian Pustaka, dan Landasan Teori, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Simpulan dan Implikasi.

#### **BAB I : Pendahuluan**

Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

1.1 Latar Belakang Penelitian

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4 Sistemattika Penulisan

#### **BAB II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori**

Kajian pustaka membahas tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kajian pustaka menguraikan tentang teori-teori dan hipotesis dugaan awal hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

#### 2.1 Kajian Pustaka

#### 2.2 Landasan Teori

#### 2.3 Hipotesis Penelitian

### **BAB III : Metode Penelitian**

Metode penelitian berisi tentang jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, dan penjelasan mengenai penggunaan metode-metode alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

#### 3.2 Definisi Operasional Variabel

#### 3.3 Metode Analisis Data

### **BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan**

Hasil analisis dan pembahasan berisi tentang deskripsi objek penelitian, temuan hasil analisis dan menjelaskan tentang interpretasi hasil penelitian.

#### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

#### 4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

### **BAB V : Simpulan dan Implikasi**

Simpulan dan implikasi berisi tentang kesimpulan kesesuaian hasil dengan hipotesis dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

#### 5.1 Simpulan

#### 5.2 Implikasi

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Berdasarkan kajian pada penelitian terdahulu, penelitian ini akan membahas variabel PDRB, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sebagai variabel yang mempengaruhi IPM periode tahun 2006-2016 dengan menggunakan metode data panel. Berikut ini merupakan jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1

Jurnal-jurnal dan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1.	Jurnal ekonomi Nur Isa Pratowo dengan judul “ <b>Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan di Jawa Tengah</b> “	Jurnal tersebut menggunakan IPM Jawa Tengah sebagai variabel dependen serta Belanja Daerah, Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan, dan Rasio Ketergantungan sebagai variabel independennya	Data dalam penelitian ini adalah penggabungan data <i>spasial</i> dan <i>series</i> . Penelitian tersebut merupakan studi pustaka dengan menganalisis data sekunder.	Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Belanja Daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap IPM di Jawa Tengah, Gini Rasio secara signifikan berpengaruh negatif terhadap IPM di Jawa Tengah, Pengeluaran Non Makanan secara signifikan berpengaruh positif terhadap IPM di Jawa Tengah, dan Rasio Ketergantungan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap IPM di Jawa Tengah.
2.	Jurnal ekonomi Tri Maryani dengan judul “ <b>Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah</b> ”.	Jurnal tersebut menggunakan IPM Provinsi Jawa Tengah sebagai variabel dependen serta pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah	Penelitian tersebut menggunakan data panel yang meliputi data <i>time series</i> dan data <i>cross section</i> .	Dari penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2007- 2009, pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di

No	Nama dan Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
		bidang kesehatan dan jumlah penduduk miskin Jawa Tengah sebagai variabel independennya.		Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2007- 2009, serta jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2007- 2009.
3.	Jurnal ekonomi dari Ayu Nanda Melliana, Ismaini Zain dengan judul “ <b>Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Data Panel</b> ”.	Jurnal tersebut menggunakan IPM sebagai variabel independen serta rasio siswa terhadap guru, angka partisipasi SMP/MTS, jumlah sarana kesehatan, persentase RT dengan penggunaan air bersih, TPAK dan PDRB perkapita sebagai variabel dependen.	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu penggabungan antara data <i>time series</i> dan data <i>cross section</i> .	Penelitian ini memperoleh hasil bahwa variabel rasio siswa terhadap guru, angka partisipasi SMP/MTs, jumlah sarana kesehatan, persentase RT dengan akses air bersih, kepadatan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap IPM.
4.	Jurnal ekonomi dari Denni Sulistio Mirza dengan judul “ <b>Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009</b> ”.	Jurnal tersebut menggunakan IPM sebagai variabel dependen serta kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal sebagai variabel independennya.	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu penggabungan antara data <i>time series</i> dan data <i>cross section</i> .	Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah.

No	Nama dan Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
5.	Jurnal ekonomi dari Mohammad Bhakti Setiawan dan Abdul Hakim dengan judul “ <b>Indeks Pembangunan Manusia Indonesia</b> ”.	Jurnal tersebut menggunakan IPM sebagai variabel independen serta PDB, PPN, Dummy Desentralisasi(DD), dan Dummy Krisis Ekonomi(DK) sebagai variabel dependennya.	Penelitian ini menggunakan <i>Error Correction Model</i> (ECM).	Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa PDB secara signifikan berpengaruh positif terhadap IPM, PPN berpengaruh negatif terhadap IPM, Dummy Desentralisasi berpengaruh negatif terhadap IPM, dan Dummy Krisis tidak berpengaruh terhadap IPM.
6.	Jurnal ekonomi D.S Mirza yang berjudul “ <b>Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap IPM di Jawa Tengah</b> ”.	Penelitian ini menggunakan IPM Jawa Tengah sebagai variabel independen serta kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal sebagai variabel dependennya.	Penelitian tersebut menggunakan analisis data panel.	Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, .
7.	Skripsi Rizki Nurfadhli dengan judul “ <b>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera Periode Tahun 2010-2015</b> ”.	Penelitian tersebut menggunakan IPM sebagai variabel independen serta APBD di bidang kesehatan, APBD di bidang pendidikan, PDRB, tingkat pengangguran	Penelitian tersebut menggunakan data panel atau gabungan antara data <i>time series</i> dan <i>cross section</i> .	Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa APBD di bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Pulau Sumatera, APBD di bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM di Pulau Sumatera, PDRB dan tingkat pengangguran terbuka tidak signifikan terhadap IPM di Pulau

No	Nama dan Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
		terbuka dan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependennya.		Sumatera, dan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap IPM di Pulau Sumatera.
8.	Penelitian Sigit Wibowo dengan judul “ <b>Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap IPM dan Pertumbuhan Ekonomi studi Provinsi Jawa Tengah</b> ”	Penelitian tersebut menggunakan IPM sebagai variabel independen serta laju PDRB, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sebagai variabel dependennya.	Penelitian tersebut menggunakan data panel atau gabungan antara data <i>time series</i> dan <i>cross section</i> .	Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa laju PDRB berpengaruh positif dan signifikan sedangkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan tidak signifikan terhadap IPM Provinsi Jawa Tengah.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia pada dasarnya mempunyai empat komponen utama yaitu produktifitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Jika keempat komponen tersebut meningkat secara maksimal maka pembangunan manusia akan berhasil dengan baik karena peran manusia merupakan agen pembangunan yang efektif (Feriyanto : 2014).

IPM disusun berdasarkan tiga indikator, yaitu angka harapan hidup (*life expectancy at age 0 = e0*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate = Lit*), rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling = MYS*), *Purchasing Power Parity* (ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli (UNDP, 1990).

IPM merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah, dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita (BPS, 2017).

Perhitungan IPM dilakukan setiap tahun, adapun manfaat perhitungan IPM antara lain (Feriyanto, 2014) :

- a. Sebagai indikator untuk perbandingan relatif kinerja antar daerah untuk menentukan peringkat pembangunan manusia di suatu wilayah.
- b. Sebagai indikator untuk mengetahui perkembangan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah baik secara total ataupun perkembangan indeks masing-masing komponen IPM.
- c. Sebagai dasar kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah agar terpacu menaikkan peringkatnya, melalui pemanfaatan sumber daya dan penentuan prioritas program peningkatan kualitas hidup manusia.
- d. Sebagai salah satu kriteria untuk penentuan besarnya alokasi dana bantuan pembangunan manusia dari pusat ke daerah.
- e. Sebagai indikator kajian untuk mengukur kinerja kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah terkait dengan hasil-hasil pembangunan lainnya seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran, peningkatan kesehatan masyarakat dan lainnya.

#### **2.2.1.1 Formula dan Penghitungan IPM**

Perhitungan IPM di suatu daerah dapat diperoleh melalui dua tahap perhitungan yaitu tahap pertama melakukan perhitungan indeks masing-masing komponen pembentuk IPM, yaitu : indeks angka harapan hidup (X1); indeks tingkat pendidikan (X2); dan indeks standar hidup layak (X3) (Feriyanto, 2014).

Formula untuk menghitung komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks}(X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

Keterangan :

$X_i$  = indikator komponen pembangunan manusia ke- $i$ ,  $i=1, 2, 3$

$X_{min}$  = nilai minimum  $X_i$ ; dan  $X_{maks}$  = nilai maksimum  $X_i$   
(Feriyanto, 2014).

### **2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (BPS, 2017).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian regional. Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga periode saat ini, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun yang tidak dipengaruhi oleh harga. PDRB

merupakan keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. Kegunaan dari PDRB antara lain(BPS, 2017) :

- a. Untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah, semakin besar angka PDRB maka semakin besar pula sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut.
- b. Untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.
- c. Untuk menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh keseluruhan penduduk suatu daerah tertentu.
- d. PDRB menurut sektor menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor perekonomian dalam suatu wilayah, sektor-sektor ekonomi yang memiliki peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
- e. Untuk menunjukkan bagaimana produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar.
- f. Untuk menunjukkan peranan kelembagaan menurut barang dan jasa yang dihasilkan sektor ekonomi.
- g. PDRB menurut harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar maupun perdagangan antar daerah.

Menurut BPS, PDRB merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh keseluruhan wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Untuk menghitung PDRB suatu daerah terdapat empat pendekatan menurut BPS Jawa Tengah (2017), yaitu:

1. Pendekatan produksi, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh balas jasa yang dihasilkan oleh seluruh perekonomian dalam waktu satu tahun.

2. Pendekatan pendapatan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yang meliputi :

- a. Upah gaji merupakan balas jasa faktor produksi tenaga kerja,
- b. Sewa tanah merupakan balas jasa faktor produksi tanah,
- c. Bunga modal merupakan balas jasa dari faktor produksi berupa modal,
- d. Keuntungan merupakan balas jasa dari faktor produksi berupa keahlian.

1. pendekatan pengeluaran, yaitu model pendekatan dengan cara menjumlahkan nilai perminta akhir dari seluruh barang dan jasa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan dari pemerintah.

- b. Barang dan jasa yang digunakan untuk membentuk modal tetap bruto.
  - c. Barang dan jasa yang digunakan sebagai modal tetap dan ekspor neto.
2. Metode alokasi, yaitu pendekatan yang digunakan karena dengan data yang tersedia tidak memungkinkan untuk mengadakan perhitungan pendapatan regional dengan metode langsung (BPS, 2017).

### **2.2.3 Jumlah Penduduk Miskin**

Kemiskinan dapat dilihat dari penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Bappeda, 2011).

Amarta Sen (2007) mengungkapkan bahwa terdapat inti absolut dalam kemiskinan. Perspektif dalam kemiskinan adalah kelaparan yang melanda, ketidakmampuan dalam kehidupan sosial dan ketidakmampuan dalam mendidik anak-anak serta merawat kesehatan anak-anak. Menurut Todaro dan Smith (2006) kemiskinan masih banyak ditemukan di negara-negara berkembang, meskipun telah dilakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan selama lebih dari separuh abad terakhir. Sedangkan jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang memiliki tingkat konsumsi dibawah garis kemiskinan (BPS: 2012).

#### **2.2.4 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan**

Beberapa ekonom menganggap bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi, baik dinilai dari stok maupun investasi. Kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik individu maupun masyarakat.

Menurut UU No. 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota dialokasikan sebesar 10 persen dari APBD di luar gaji.

#### **2.2.5 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan**

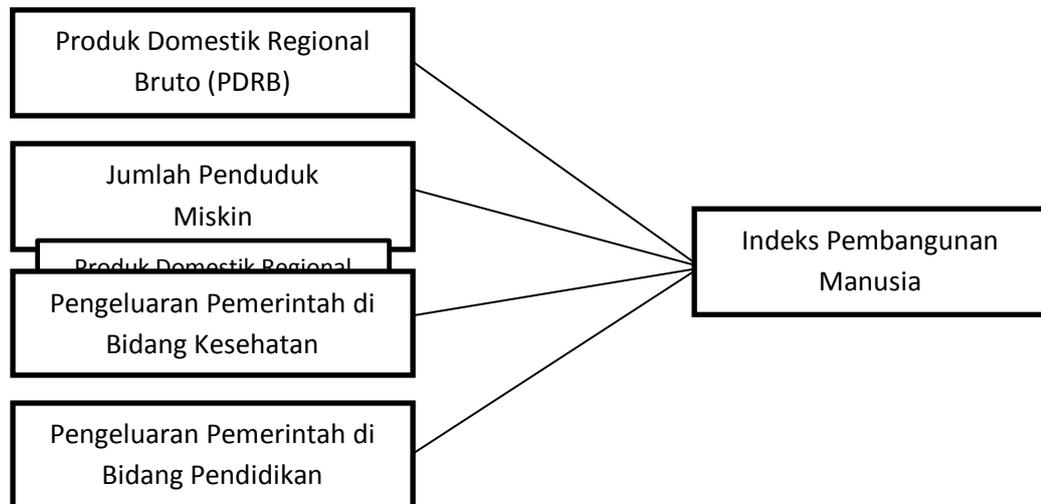
Pengertian pendidikan menurut Undang-undang SISDIKNAS n0. 20 tahun 2003 bahwa pendidikan sebagai usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensi diri secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak yang mulia.

Fasilitas pendidikan sendiri memiliki makna yaitusemua saran dan prasarana yang mendukung aktifitas pembelajaran, contohnya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan ( Wirjasantos, 1984). Fasilitas

pendidikan yang memadai pada suatu wilayah maka akan mempengaruhi tingkat melek huruf di wilayah tersebut.

UU No.20 tahun 2003 menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional ( APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



### 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau suatu kesimpulan awal yang masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui analisis dan pengujian data (empiris). Hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga PDRB Atas Harga Konstan 2000 berpengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.

2. Diduga jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.
3. Diduga pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.
4. Diduga pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.
5. Diduga PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, jumlah penduduk miskin, jumlah pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka membuktikan hipotesis yang dirumuskan, serta menjawab rumusan masalah. Metodologi penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2016, data jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2016, data pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2016, dan data pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2016.

Data mengenai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dengan alamat *website* [www.jateng.bps.co.id](http://www.jateng.bps.co.id).

#### **3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Penelitian ini menggunakan variabel sebagai berikut:

### **3.2.1 Variabel Dependen**

#### **1. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur kualitas manusia dalam suatu wilayah tertentu (BPS, 2017). IPM dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Data IPM diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dengan alamat [www.jateng.bps.co.id](http://www.jateng.bps.co.id) dengan satuan persen.

### **3.2.2 Variabel Independen**

#### **1. PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto merupakan suatu indikator untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam periode tertentu, atas dasar harga konstan 2000 (BPS, 2017). PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam penelitian ini merupakan variabel dependen. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2016 diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dengan alamat [www.jateng.bps.co.id](http://www.jateng.bps.co.id) dengan satuan juta rupiah.

#### **2. Jumlah Penduduk Miskin**

Jumlah penduduk miskin merupakan jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan ( BPS, 2012). *World Bank* (2010) mendefinisikan

kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan dan terdiri dari banyak dimensi yaitu berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Jumlah penduduk miskin dalam penelitian ini termasuk dalam variabel dependen. Data jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2016 diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dengan alamat [www.jateng.bps.co.id](http://www.jateng.bps.co.id) dengan satuan ribu jiwa.

### **3. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan**

Menurut UU No. 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota dialokasikan sebesar 10 persen dari APBD di luar gaji. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan pada penelitian ini merupakan variabel dependen. Data pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dengan alamat [www.jateng.bps.co.id](http://www.jateng.bps.co.id) dengan satuan juta rupiah.

### **4. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan**

UU No.20 tahun 2003 menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Nasional ( APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Data pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2016 diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dengan alamat [www.jateng.bps.co.id](http://www.jateng.bps.co.id) dengan satuan juta rupiah.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data panel. Metode data panel digunakan pada penelitian ini karena data yang digunakan menggunakan data panel yaitu campuran antara data *time series* dan data *cross section*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data per kabupaten/kota dalam periode tahun 2006 sampai tahun 2016.

Menurut Gujarati (2004) data panel disebut juga dengan data longitudinal yang merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap banyak individu.

Keunggulan menggunakan data panel adalah sebagai berikut (Gujarati, 2004) :

a. Teknik estimasi menggunakan data panel yang menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul karena masalah penghilangan variabel (*omitted variable*).

- b. Memberikan informasi yang lebih banyak, variabel yang lebih baik, mengurangi hubungan antara variabel bebas, memberikan lebih banyak derajat kebebasan, dan lebih efisien.
- c. Data panel lebih cocok digunakan jika akan melakukan studi tentang perubahan dinamis.
- d. Data panel dapat mendeteksi dan mengukur efek yang tidak bisa dilakukan oleh data *time-series* dan *cross section*.
- e. Data panel memungkinkan peneliti untuk mempelajari model perilaku yang lebih kompleks.
- f. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregat individu, karena data yang diobservasi lebih banyak.

Menurut Widarjono (2007: hal.251), terdapat tiga teknik untuk mengestimasi data panel. Pertama, uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau metode *Fixed Effect*. Kedua, uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau *Fixed Effect* dengan metode *Random Effect*.

a. Model *Common Effect*

Model *Common Effect* merupakan model yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengombinasikan data *cross section* dan data *time series* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Metode ini sering mengabaikan adanya

perbedaan dimensi individu maupun waktu atau perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.

b. Model Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap. Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu.

c. Model Efek Random (*Random Effect*)

*Random Effect* mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel random atau acak. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil populasi.

Menurut Widarjono (2007: hal.258) ada tiga uji yang digunakan untuk memilih ketiga teknik data panel tersebut, yaitu pertama dilakukan uji F yaitu untuk memilih antara metode *Common Effect* dan *Fixed Effect*, kedua Uji Hausman untuk memilih metode *Fixed Effect* dengan metode *Random Effect*, yang ketiga uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* dengan *Random Effect*.

### **3.4 Pemilihan Metode Estimasi**

Sriyana (2014) ada dua cara pemilihan model terbaik yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis yaitu: Pertama, Uji dengan cara membandingkan antara metode *common effect*, dan *fixed effect* yang

disebut dengan *Chow test*. Kedua, Uji Hausman digunakan untuk memilih antara *fixed effect* dengan *random effect*.

#### 3.4.1 Uji F (*Chow Test*)

Dalam uji ini, uji signifikan *fixed effect* digunakan dalam memutuskan model manakah yang digunakan. *Chow test* adalah pengujian untuk menentukan model *fixed effect* atau *common effect* dengan asumsi,

Ho : Memilih model *Common Effect*

Ha : Memilih model *Fixed Effect*

$$F \text{ hitung} = \frac{SSR_R - SSR_u/q}{SSR_u/(n - k)}$$

Apabila hasil yang diterima menerima H nol maka model yang layak digunakan untuk estimasi akhir yaitu *Common effect models*, dan model tidak perlu dilanjutkan sampai *Random Effect models*. Sedangkan hasil menunjukkan menolak H nol maka model yang layak digunakan untuk estimasi akhir yaitu *Fixed Effect models* dan dapat dilanjutkan ke *Random Effect models*.

### 3.4.2 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih model *fixed effect* atau model *random effect*. Berikut adalah hipotesis dalam pengujian uji Hausman:

Ho : Memilih model *Random Effect*

Ha : Memilih model *Fixed Effect*

$$M = q \text{ var } (q)^{-1} q$$

Jika nilai statistik hausman probabilitas  $>$  alpha (0,05) yang digunakan maka model *random effect* baik untuk digunakan.

### 3.5 Uji Statistik

Uji Statistik dilakukan untuk mengukur ketetapan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinanya ( $R^2$ ), pengujian koefisiensi regresi secara serentak (Uji F), dan pengujian koefisiensi regresi secara individual (Uji t).

#### 3.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa baik dalam analisis, yang ditunjukkan oleh nilai  $R^2$  dalam bentuk persentase. Nilai  $R^2$  berkisar antara  $0 < R^2 < 1$ . Semakin besar  $R^2$  menunjukkan semakin baik kualitas dari model tersebut, karena akan dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dan sisanya tidak dijelaskan dalam model. Semakin tinggi nilainya semakin erat pula hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen (Gujarati, 2013).

### 3.5.2 Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Sriyana (2014) Uji F-statistik merupakan pengujian variabel bebas terhadap variabel terkait secara individual dan uji bersama-sama. Hipotesis untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$$

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Jika nilai probabilitas  $> \alpha$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sebaliknya probabilitas  $< \alpha$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang berarti secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.5.3 Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t merupakan prosedur dalam menyusun hipotesis statistik, menentukan derajat kesalahan ( $\alpha$ ), menentukan t kritis dan keputusan hipotesis. Uji t dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel lain tetap.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 > 0$$

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 < 0$$

$t_{hitung} < t_{tabel}$  yang berarti gagal menolak  $H_0$  Variabel tidak mempengaruhi

$t_{hitung} > t_{tabel}$  yang berarti Variabel mempengaruhi

$$t = \frac{\beta_1}{Se\beta_1}$$

Penentuan tingkat signifikan  $\alpha$  5% dengan kriteria pengujian : jika nilai probabilitas  $> \alpha$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya jika probabilitas  $< \alpha$   $H_0$  ditolak yang berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. (Sriyana,2014).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari *website* resmi Badan Pusat Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan jurnal-jurnal yang mendukung. Tujuan dalam penelitian adalah meneliti variabel independen yang meliputi PDRB, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini juga menggunakan data dalam kurun waktu 2006-2016.

##### **4.1.1 Analisis Deskripsi Data Penelitian**

###### **1. PDRB**

Dilihat pada tabel lampiran 1 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki rata-rata PDRB tertinggi adalah Kota Semarang yaitu sebesar 59.455.871,62 juta rupiah, sedangkan rata-rata PDRB terendah diraih oleh Kota Magelang sebesar 2.926.033,94 juta rupiah.

###### **2. Jumlah Penduduk Miskin**

Dilihat pada tabel lampiran 2 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki rata-rata jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Kabupaten Brebes yaitu sebesar 408,91 ribu jiwa, sedangkan

Kabupaten/Kota yang memiliki rata-rata jumlah penduduk miskin terendah adalah Kota Magelang yaitu sebesar 12,54 ribu jiwa.

### 3. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan

Dilihat pada tabel lampiran 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki rata-rata pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan tertinggi adalah Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 219.557 juta rupiah, sedangkan rata-rata pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terendah adalah Kota Pekalongan yaitu rata-rata sebesar 66.591 juta rupiah.

### 4. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Dilihat pada tabel lampiran 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki rata-rata pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tertinggi diraih oleh Kabupaten Klaten yaitu sebesar 759.314 juta rupiah, sedangkan rata-rata terendah pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yaitu sebesar 150.704 juta rupiah.

## 4.2 Hasil dan Analisis Data

Pemilihan model regresi dalam penelitian ini adalah dengan data panel. Data panel terdiri dari tiga model yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect Model*. Pemilihan model regresi dapat menggunakan Uji *Chow Test* dan Uji *Hausman Test*. Uji *Chow Test* dilakukan untuk memilih model yang bagus diantara model *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Model yang bagus hasil dari Uji

*Chow* dibandingkan kembali dengan model *Random Effect* dengan menggunakan Uji *Hausman Test*.

#### 4.2.1 Uji Chow Test

Uji *chow* digunakan untuk memilih antara model *common effect* atau *fixed effect*. Hipotesis:

Ho : Memilih model *common effect*

Ha : Memilih model *fixed effect*

**Tabel 4.1**

**Hasil Pengujian *Chow Test***

<b>Effects Test</b>	<b>d.f.</b>	<b>Prob.</b>
Cross-section F	34,346	0.0000
Cross-section Chi-square	34	0.0000

Sumber: Data yang diolah dengan *E Views 9*

Ho: *Common Effect* probabilitas lebih besar dari 5% dan Ha: *Fixed Effect* probabilitas kurang dari 5%. Hasil regresi diatas menunjukkan bahwa probabilitas F statistiknya sebesar 0,000000 atau kurang dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian ini model *Fixed Effect* yang paling bagus digunakan.

#### 4.2.2 Uji Hausman Test

Uji *hausman* digunakan untuk memilih model terbaik antara *fixed effect* dan *random effect*. Hipotesis:

Ho: Memilih *Random effect*

Ha: Memilih *Fixed effect*

**Tabel 4.2**

**Hasil Pengujian *Hausman Test***

Test Summary	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4	0.4747

Sumber: Data yang diolah dengan *E Views 9*

Ho: Random Effect probabilitas lebih besar dari 5% dan Ha: Fixed Effect probabilitas kurang dari 5%. Hasil regresi diatas menunjukkan probabilitas F statistiknya sebesar 0,4747 atau lebih dari 5%, maka model yang bagus digunakan menurut pengujian ini adalah model *Random Effect*.

**Tabel 4.3**

**Hasil Regresi Random Effect**

Dependent Variable: IPM

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Total panel (balanced) observations: 385

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	75.58248	0.814564	92.78884	0.0000
PDRB	-7.53E-14	8.98E-13	-0.083946	0.9331
PEND_MISKIN	-0.026746	0.003566	-7.500600	0.0000
ANG_KESEHATA N	-1.33E-05	3.79E-06	-3.518489	0.0005
ANG_PENDIDIKA N	3.40E-06	1.28E-06	2.649885	0.0084

Effects Specification

Cross-section random	1.773796	0.1729
Idiosyncratic random	3.878984	0.8271

---



---

Weighted Statistics

---



---

R-squared	0.139140	Mean dependent var	39.26998
Adjusted R-squared	0.130079	S.D. dependent var	4.156273
S.E. of regression	3.876538	Sum squared resid	5710.468
F-statistic	15.35482	Durbin-Watson stat	1.081101
Prob(F-statistic)	0.000000		

---



---

Unweighted Statistics

---



---

R-squared	0.242289	Mean dependent var	71.33954
Sum squared resid	6850.671	Durbin-Watson stat	0.901166

---



---

Sumber: E Views 9

### 4.3 Hasil Uji Statistik

Berdasarkan pemilihan model yang telah dilakukan dengan menggunakan Uji *Chow* dan Uji *Hausman* maka model *Random Effect* merupakan model yang terbaik untuk mengestimasi.

#### 4.3.1 Koefisien Determinasi (R-square)

Nilai koefisien determinasi (R-square) pada model *Random Effect* adalah sebesar 0,139140 yang artinya PDRB, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan mampu menjelaskan IPM sebesar 13,9140%, sedangkan sisanya 86,086% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

### 4.3.2 Uji f

Uji f digunakan untuk menguji secara bersama-sama. Hipotesis sebagai berikut:

H<sub>0</sub>: variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dengan signifikansi probabilitas F statistik lebih besar dari 5%.

H<sub>a</sub>: variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen dengan signifikansi probabilitas kurang dari 5%.

Nilai f statistik pada model *Random Effect* menunjukkan angka 15,35482 dengan probabilitas f statistiknya sebesar 0,000000 atau kurang dari 5%, maka H<sub>0</sub> ditolak artinya PDRB, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM.

### 4.3.3 Uji t

**Tabel 4.4**

**Uji t**

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Keterangan
PDRB	-7.53E-14	0.9331	Tidak Signifikan
Jumlah Penduduk Miskin	-0.026746	0.0000	Signifikan
Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan	-1.33E-05	0.0005	Signifikan
Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan	3.40E-06	0.0084	Signifikan

Sumber: *E Views 9*

Uji t merupakan pengujian masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Hipotesis:

a. PDRB

Hasil regresi model *Random Effect* PDRB memiliki angka koefisien sebesar -0,0000000000000753 dengan probabilitas PDRB sebesar 0,9331 dengan  $\alpha=5\%$ , artinya probabilitas PDRB lebih besar 5%, maka PDRB tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

b. Jumlah Penduduk Miskin

Hasil regresi model *Random Effect* jumlah penduduk miskin memiliki angka koefisien sebesar -0,026746 dengan probabilitas jumlah penduduk miskin sebesar 0,0000 dengan  $\alpha=5\%$ , artinya probabilitas kurang dari 5% maka jumlah penduduk miskin signifikan dan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

c. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan

Hasil regresi model *Random Effect* pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki angka koefisien sebesar -0,00000133 dengan probabilitas pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan sebesar 0,0005 dengan  $\alpha=5\%$ , artinya probabilitas kurang dari 5% maka jumlah pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

d. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Hasil regresi model *Random Effect* Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan memiliki koefisien sebesar 0,000000340 dengan probabilitas pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sebesar 0,0084 dengan  $\alpha=5\%$ ,

artinya probabilitas tersebut lebih kecil dari 5% maka Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

#### **4.4 Interpretasi Hasil**

Hasil regresi tersebut memperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{IPM} = 75,58248 - 0,000000000000000753 \text{ PDRB} - 0,026746 \text{ Penduduk Miskin} - 0,00000133 \text{ Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan} + 0,000000340 \text{ Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan}$$

Nilai koefisien regresi Penduduk Miskin diperoleh nilai sebesar -0,026746 menunjukkan bahwa ketika Penduduk Miskin naik sebesar seribu jiwa, maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik sebesar 0,026746 persen.

Nilai koefisien regresi Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan sebesar 0,00000133 menunjukkan bahwa ketika Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan naik sebesar satu juta rupiah, maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik sebesar 0,00133 persen.

Nilai koefisien regresi Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan sebesar 0,000000340 menunjukkan bahwa ketika Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan naik sebesar satu juta rupiah, maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik sebesar 0,000340 persen.

Jika PDRB, penduduk miskin, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan sama dengan 0, maka IPM sama dengan 75,58248 persen.

#### **4.5 Pembahasan**

##### **1. Pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, PDRB pada penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis dikarenakan penelitian ini menggunakan periode waktu yang cukup panjang yaitu 2006-2016 atau sepuluh tahun, di tahun 2006-2012 komponen pembentuk PDRB atas harga konstan 2000 hanya 7 komponen yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa sedangkan PDRB tahun 2013-2016 komponen PDRB ada 8 komponen yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa dan net ekspor antar provinsi. Perbedaan tersebut yang membuat PDRB tidak signifikan terhadap IPM. Hal ini sesuai dengan penelitian Rizki Nurfadhli, 2015.

##### **2. Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh yang signifikan dan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jika jumlah penduduk miskin di suatu wilayah berkurang artinya pendapatan masyarakat tinggi

sehingga daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat juga tinggi sehingga Indeks Pembangunan Manusia di wilayah tersebut juga tinggi. Hasil yang diperoleh sesuai dengan penelitian Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, 2014.

### 3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki pengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini menunjukkan hubungan antara pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif terhadap IPM karena biaya pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan masih bersifat global dimana sebagian besar anggaran bukan untuk biaya langsung peningkatan sumber daya manusia tetapi untuk gaji pegawai dan biaya operasional lainnya. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang banyak akan menunjang tingkat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, wilayah yang memiliki tingkat kesehatan yang tinggi maka akan mempengaruhi angka harapan hidup yang tinggi sehingga akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Sigit Wibowo, 2016.

### 4. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memiliki hubungan signifikan dan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yang banyak akan menunjang tingkat pendidikan masyarakat pada suatu wilayah, wilayah yang memiliki sarana prasarana sekolah yang memadai maka dapat mempermudah akses untuk bersekolah sehingga akan menambah jumlah angka melek huruf di wilayah tersebut sehingga akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Tri Maryani, 2012.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Tingginya PDRB di suatu wilayah menunjukkan bahwa pendapatan per kapita di wilayah tersebut juga tinggi sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan hidup seperti kebutuhan untuk konsumsi, kebutuhan untuk pendidikan dan kebutuhan untuk kesehatan sehingga memicu kenaikan angka Indeks Pembangunan Manusia. Tetapi pada penelitian ini PDRB tidak signifikan terhadap IPM, karena penelitian ini menggunakan periode waktu yang cukup panjang yaitu 2006-2016 atau sepuluh tahun, di tahun 2006-2012 komponen pembentuk PDRB atas harga konstan 2000 hanya 7 komponen yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa sedangkan PDRB tahun 2013-2016 komponen PDRB ada 8 komponen yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa dan net ekspor antar provinsi. Perbedaan tersebut yang membuat PDRB tidak signifikan terhadap IPM.

2. Variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Jika jumlah penduduk miskin di suatu wilayah berkurang artinya masyarakat memiliki pendapatan menengah ke atas, hal tersebut dapat mempengaruhi tingginya daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat, dimana hal tersebut dapat menaikkan angka Indeks Pembangunan Manusia.

3. Variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Seharusnya pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dapat menjadi sarana penunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Semakin banyak pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan di suatu wilayah maka semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Masyarakat yang sehat maka akan mempengaruhi produktifitasnya, sehingga dapat menaikkan angka Indeks Pembangunan Manusia. Tetapi karena biaya pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan masih bersifat global dimana sebagian besar anggaran bukan untuk biaya langsung peningkatan sumber daya manusia tetapi untuk gaji pegawai dan biaya operasional lainnya sehingga pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan pada penelitian ini belum mampu membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

4. Variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan signifikan dan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah, tingginya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan maka dapat

meningkatkan angka melek huruf di wilayah tersebut yang memicu kenaikan Indeks Pembangunan Manusia pada di Provinsi Jawa Tengah.

5. Variabel PDRB, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.

## **5.2 Implikasi**

Implikasi yang dapat disampaikan dalam uraian kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. PDRB memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Terkait untuk mendapatkan PDRB yang tinggi maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menyiapkan lapangan pekerjaan yang memadai serta melakukan pelatihan kewirausahaan agar mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan perkapita yang akan menaikkan angka Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.

2. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Sebaiknya pemerintah melakukan perbaikan terhadap pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan untuk lain waktu. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhadika, T., & Pujiyono, A. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 1–13. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>.
- Anonim. (2010). Pembangunan, I., & Ipm, M. Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006-2010 Oleh : dwi Heriyanto, 1–18.
- \_\_\_\_\_.(2011). Ekonomi, A. P., Hidup, H., Huruf, A. M., Sekolah, R. L., Dan, P., Penduduk, J., ... Jawa, D. I. Fakultas Ekonomika Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- \_\_\_\_\_.(2012).Ekonomi, I., Studi, D. A. N., Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. Fiskal terhadap Angka Melek Huruf Perempuan dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan di Kabupaten/ Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_.(2017). Keuangan, M. D. A. N., Partisipasi, A., Aps, S., & Kota, D. Jurnal pendidikan ekonomi manajemen dan keuangan, 1(2).
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.2011. Pengertian Kemiskinan. Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik (2007):Indeks Pembangunan Manusia, Jawa Tengah.,dari <http://www.jateng.bps.co.id>
- \_\_\_\_\_. (2017):Indeks Pembangunan Manusia, Jawa Tengah.,dari <http://www.jateng.bps.co.id>
- Bhakti, Nadia Ayu. (2012). Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia periode 2008-2012. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Chalid, Nursiah. (2014). “ Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/ Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau’ . *Jurnal Ekonomi*.
- Feriyanto,N..(2014), "Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Indonesia".UPP STIM YKPN,Yogyakarta.
- Gujarati N.Damodar.(2004). *Basic Econometrics fourth edition*. McGraw-Hill
- Indonesia, U. I. (2008).Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Mohammad Bhakti Setiawan & Abdul Hakim. *Jurnal Economia*, 9(April), 18–26.

- Maryani, T. (2009). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di provinsi Jawa Tengah. *Non Publication*, 1–15.
- Mirza, D. S. (2015). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah. *Jejak*, 4(3), 276–284. <https://doi.org/10.15294/EDAJ.V1I2.474>
- Meilliana, Ayunda. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains dan Seni Pomits*.
- Moehaditoyo, S. H. (1945). Srie Hartutie Moehaditoyo, 5(April 2009).
- Patriotika, P. M. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat, (80), 452–469.
- Pratama, Y.C. (2014). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*.
- Pratowo, N. I. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, 15–31.
- Sen, Amartya. (2007). *Children and Human Rights*. Indian Journal of Human Development.
- Sriyana, J. (2014), “Metode Regresi Data Panel”, Ekonisia, Yogyakarta.
- Statistika, A., Melliana, A., & Zain, I. (2013). Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel, 2(2).
- Sukirno, Sadono. 2011. *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua*. Rajawali Press, Jakarta.
- Todaro, M. 2006. *Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Undang-undang SISDIKNAS n0. 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan
- UNDP, 1990. *Human Development Report 1990*. New York. Oxford University Press.
- UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*). (2007). International Literacy Prizes. <http://unesdoc.unesco.org/images.pdf>
- Widarjono, Agus (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*, edisi kedua. Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.
- Widodo, A., Waridin, & Maria K., J. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan

Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25–42. Retrieved from [http://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika\\_pembangunan/article/view/1656](http://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/view/1656)

## **LAMPIRAN**

## Lampiran I

### Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah, 2006-2016 (Persen)

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Cilacap	69,50	69,80	70,90	71,39	71,73	72,34	72,77	73,34	67,25	67,77	68,60
Kabupaten Purbalingga	70,70	70,80	71,80	72,27	72,60	72,96	73,33	73,96	66,23	67,03	70,49
Kabupaten Banyumas	69,30	69,90	70,90	71,51	72,07	72,50	72,97	73,49	69,25	69,89	67,48
Kabupaten Banjarnegara	67,30	68,30	69,00	69,63	69,91	70,39	70,70	71,13	63,15	64,73	65,52
Kabupaten Kebumen	68,90	69,50	70,20	70,73	71,12	71,62	71,86	72,25	65,67	66,87	67,41
Kabupaten Purworejo	69,10	70,20	71,30	71,88	72,55	72,91	73,53	74,18	70,12	70,37	70,66
Kabupaten Wonosobo	67,60	68,80	69,50	70,08	70,52	71,06	71,45	71,90	65,20	65,70	66,19
Kabupaten Magelang	69,90	70,60	71,40	71,76	72,08	72,69	73,14	73,67	66,35	67,13	67,85
Kabupaten Boyolali	69,00	69,40	70,00	70,44	70,72	71,25	71,50	71,88	70,34	71,74	72,18
Kabupaten Klaten	71,40	71,80	72,90	73,41	73,83	74,10	74,46	74,91	73,19	73,81	73,97
Kabupaten Sukoharjo	71,20	71,70	73,00	73,29	73,57	73,97	74,21	74,91	73,76	74,53	75,06
Kabupaten Wonogiri	69,00	69,90	70,50	71,04	71,33	71,86	72,59	73,09	66,77	67,76	68,23
Kabupaten Karanganyar	70,70	71,10	72,20	72,55	73,19	73,82	74,62	75,27	73,89	74,26	74,90
Kabupaten Sragen	66,60	67,80	69,60	70,27	71,00	71,33	71,85	72,31	70,52	71,10	71,43
Kabupaten Grobogan	68,20	69,20	70,20	70,60	70,83	71,27	71,77	72,37	67,77	68,05	68,52
Kabupaten Blora	67,90	68,40	69,60	70,14	70,61	71,25	71,49	72,10	65,84	66,22	66,61

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kabupaten Rembang	69,00	69,70	71,10	71,55	72,07	72,45	72,81	73,53	67,40	68,18	68,60
Kabupaten Pati	70,90	71,80	72,30	72,72	72,96	73,49	73,81	74,58	66,99	68,51	69,03
Kabupaten Kudus	70,00	71,30	72,00	72,57	72,95	73,24	73,69	74,09	72,00	72,72	72,94
Kabupaten Jepara	69,60	70,00	71,90	72,45	72,64	73,12	73,54	74,13	69,61	70,02	70,25
Kabupaten Demak	69,40	70,30	71,60	72,10	72,58	73,09	73,52	73,85	68,95	69,75	70,10
Kabupaten Semarang	71,90	72,20	73,30	73,66	74,10	74,45	74,98	75,48	71,65	71,89	72,40
Kabupaten Temanggung	71,80	72,70	73,40	73,85	74,11	74,47	74,74	75,00	65,97	67,07	67,60
Kabupaten Kendal	67,50	68,30	69,40	70,07	70,41	70,85	71,48	72,03	68,46	69,57	70,11
Kabupaten Batang	67,60	68,40	69,20	69,84	70,41	71,06	71,41	72,03	64,07	65,46	66,38
Kabupaten Pekalongan	68,20	69,40	70,30	70,83	71,40	71,86	72,37	73,14	66,98	67,40	67,71
Kabupaten Pemalang	66,30	67,40	68,40	69,02	69,89	70,22	70,66	71,26	62,35	63,70	64,17
Kabupaten Tegal	67,50	67,80	69,50	70,08	70,59	71,09	71,74	72,22	64,10	67,04	65,84
Kabupaten Brebes	64,30	65,90	67,10	67,69	68,20	68,61	69,37	69,85	62,55	63,18	63,98
Kota Magelang	74,70	75,50	76,10	76,37	76,60	76,83	77,26	77,91	75,79	76,39	77,16
Kota Surakarta	76,00	76,40	77,20	77,49	77,86	78,18	78,60	79,10	79,34	80,14	80,76
Kota Salatiga	74,80	75,10	75,80	76,11	76,53	76,83	77,13	77,54	79,98	80,23	81,14
Kota Semarang	75,30	75,90	76,50	76,90	77,11	77,42	77,98	78,54	79,24	80,23	81,19
Kota Pekalongan	71,90	72,50	73,50	74,01	74,47	74,90	75,25	75,75	71,53	72,69	73,32
Kota Tegal	71,40	72,40	73,20	73,63	73,89	74,20	74,63	75,02	72,20	72,96	73,55

**Sumber: BPS (2017)**

## Lampiran II

### PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Juta Rupiah), 2006 – 2016

Kabupaten/ Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Cilacap	20.564.936,12	21.108.693,94	22.390.015,92	22.732.979,33	23.736.627,80	24.702.784,39	25.452.057,81	86 477 559,97	92 025 901,06	98 831 586,98	100 155 799,03
Kabupaten Banyumas	3.759.547,61	3.958.645,95	4.171.468,95	4.400.542,23	4.654.634,02	4.931.433,05	5.221.519,49	31 369 317,74	34 923 374,71	38 798 789,35	42 016 940,50
Kabupaten Purbalingga	2.018.808,10	2.143.746,23	2.257.392,77	2.390.244,57	2.525.872,73	2.678.085,09	2.845.663,33	14 791 295,75	16 630 445,01	18 423 659,76	19 923 741,57
Kabupaten Banjarnegara	2.376.694,59	2.495.785,82	2.619.989,61	2.753.935,73	2.888.524,12	3.030.542,04	3.189.651,65	12 751 207,07	14 342 957,21	15 847 808,40	17 241 466,35
Kabupaten Kebumen	2.460.816,97	2.572.062,88	2.721.253,89	2.828.395,08	2.945.829,46	3.070.381,16	3.242.111,77	16 526 133,05	18 645 422,21	20 742 286,13	22 318 048,93
Kabupaten Purworejo	2.442.927,31	2.591.535,38	2.737.087,13	2.872.723,79	3.016.597,82	3.168.113,40	3.327.672,40	11 462 756,67	12 660 418,96	13 846 863,62	14 968 991,36
Kabupaten Wonosobo	1.621.132,33	1.679.149,65	1.741.148,31	1.811.092,67	1.888.808,28	1.974.114,16	2.075.562,03	11 749 524,22	13 001 090,49	14 150 509,87	15 365 351,61
Kabupaten Magelang	3.405.369,22	3.582.647,65	3.761.388,59	3.938.764,68	4.116.390,07	4.292.354,46	4.542.888,65	19 602 844,86	21 923 411,31	24 131 644,16	26 223 219,71
Kabupaten Boyolali	3.601.225,20	3.748.102,11	3.899.372,86	4.100.520,26	4.248.048,24	4.472.217,00	4.725.558,65	18 806 295,97	21 117 415,24	23 550 823,14	25 929 835,07

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kabupaten Klaten	4.253.788,00	4.394.688,02	4.567.200,96	4.761.018,67	4.843.247,26	4.938.050,65	5.211.757,15	23 345 149,84	26 270 890,31	28 988 778,55	31 558 691,06
Kabupaten Sukoharjo	4.120.437,35	4.330.992,90	4.540.751,53	4.756.902,50	4.978.263,31	5.206.687,70	5.468.708,95	22 048 803,61	24 407 488,81	26 711 546,80	29 094 614,23
Kabupaten Wonogiri	2.528.851,78	2.657.068,89	2.770.435,78	2.901.577,44	3.071.963,79	3.140.855,16	3.325.089,57	17 640 990,52	19 668 236,61	21 572 475,62	23 281 134,37
Kabupaten Karanganyar	4.401.301,74	4.654.054,50	4.900.690,40	5.172.268,33	5.452.435,49	5.752.136,99	6.086.877,13	22 219 243,68	24 635 058,52	26 904 049,89	29 322 302,40
Kabupaten Sragen	2.442.570,43	2.582.492,48	2.729.450,32	2.893.427,19	3.069.751,14	3.270.052,52	3.485.992,03	21 870 800,98	24 569 005,63	27 309 123,08	29 617 342,98
Kabupaten Grobogan	2.682.467,18	2.799.700,55	2.948.793,80	3.097.093,25	3.253.398,56	3.370.343,70	3.578.062,78	16 626 336,25	18 181 835,66	20 182 089,20	21 737 317,31
Kabupaten Blora	1.803.169,23	1.871.131,42	1.979.627,22	2.078.031,30	2.182.808,64	2.241.692,19	2.354.139,78	13 543 661,54	15 101 975,26	16 368 347,06	19 964 349,71
Kabupaten Rembang	1.926.563,25	1.999.951,16	2.093.412,59	2.186.736,49	2.283.965,70	2.384.459,23	2.500.796,46	11 441 103,05	12 821 715,64	13 897 816,58	14 867 075,74
Kabupaten Pati	3.770.330,52	3.966.062,17	4.162.082,37	4.357.144,03	4.579.852,54	4.828.723,12	5.114.682,32	25 931 377,59	28 504 861,79	31 224 449,21	33 646 610,22
Kabupaten Kudus	10.881.159,80	11.243.359,38	11.683.819,73	12.144.952,38	12.651.591,64	13.184.051,12	13.754.585,17	70 323 525,77	78 800 893,20	84 607 068,54	90 014 557,29
Kabupaten Jepara	3.554.051,11	3.722.677,82	3.889.988,85	4.085.438,36	4.270.256,90	4.502.689,29	4.763.305,81	18 022 612,49	20 067 294,01	22 071 848,25	23 903 616,74
Kabupaten Demak	2.570.573,50	2.677.366,77	2.787.524,02	2.901.151,51	3.020.821,04	3.156.126,24	3.302.610,17	15 770 997,22	17 381 397,08	19 330 295,28	20 843 920,87
Kabupaten Semarang	4.652.041,80	4.871.444,25	5.079.003,74	5.300.723,41	5.560.551,90	5.869.949,71	6.223.188,31	29 789 069,83	33 160 762,12	36 429 157,58	40 100 266,41
Kabupaten Temanggung	2.060.140,24	2.143.221,21	2.219.155,63	2.309.841,53	2.409.386,40	2.521.439,02	2.648.488,46	13 088 402,25	14 592 453,38	16 107 061,67	17 526 473,01
Kabupaten Kendal	4.434.408,16	4.625.455,57	4.822.465,28	5.090.286,60	5.394.079,29	5.717.086,83	6.033.632,04	25 274 543,43	28 194 358,49	30 908 074,16	33 776 400,25
Kabupaten Batang	2.022.301,42	2.092.973,93	2.169.854,55	2.250.616,82	2.362.482,41	2.486.765,60	2.611.528,72	12 886 461,55	14 408 439,19	15 908 510,08	17 200 827,39

Kabupaten/ Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Pekalongan	2.710.378,32	2.834.685,01	2.970.214,98	3.098.071,49	3.230.351,23	3.384.387,72	3.564.599,07	13 757 494,78	15 268 426,26	16 804 659,86	18 228 695,67
Kabupaten Pemalang	2.865.095,20	2.993.296,76	3.142.808,70	3.293.056,25	3.455.713,42	3.622.635,53	3.813.839,22	15 032 617,79	16 751 917,32	18 491 385,49	20 036 515,72
Kabupaten Tegal	2.955.259,71	3.120.395,64	3.286.263,44	3.460.131,60	3.627.198,20	3.801.779,47	4.001.204,96	20 767 110,98	23 108 651,43	25 590 642,44	27 727 792,98
Kabupaten Brebes	4.551.196,99	4.769.145,46	4.998.528,19	5.247.897,41	5.507.402,71	5.780.877,86	6.082.267,39	27 437 547,11	30 899 921,71	34 447 079,42	37 340 820,52
Kota Magelang	899.564,97	946.098,16	993.835,20	1.044.650,24	1.108.603,69	1.169.342,74	1.245.158,09	5 356 942,92	5 926 218,36	6 480 578,87	7 015 380,08
Kota Surakarta	4.067.529,94	4.304.287,37	4.549.342,95	4.817.877,63	5.103.886,24	5.411.912,32	5.742.861,31	29 081 312,47	32 062 446,90	34 982 374,09	37 793 266,18
Kota Salatiga	752.149,22	792.680,44	832.154,87	869.452,99	913.020,04	961.024,62	1.018.183,45	7 990 573,60	8 870 865,65	9 718 060,71	10 551 362,64
Kota Semarang	17.118.705,28	18.142.639,96	19.156.814,29	20.180.577,95	21.365.817,80	22.736.136,19	24.196.487,78	108 807 145,40	122 109 871,16	134 206 715,61	145 993 676,40
Kota Pekalongan	1.753.405,74	1.820.001,21	1.887.853,70	1.978.082,25	2.087.114,17	2.200.827,78	2.324.147,40	6 396 422,00	7 092 776,58	7 778 271,61	8 507 535,11
Kota Tegal	1.054.499,45	1.109.438,21	1.166.587,87	1.225.102,11	1.281.528,20	1.340.227,74	1.408.144,10	9 136 585,52	10 060 187,39	10 984 998,70	11 886 655,93

**Sumber: BPS (2017)**

### Lampiran III

#### Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2006-2016 (Ribuan Jiwa)

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Cilacap	402,10	363,60	343,90	318,75	297,20	282,00	260,90	255,70	239,80	243,50	240,20
Kabupaten Banyumas	362,20	333,00	340,60	319,85	314,10	328,50	303,90	296,80	283,50	285,90	283,90
Kabupaten Purbalingga	262,90	246,30	221,90	205,01	208,90	196,00	181,30	181,10	176,00	176,50	171,80
Kabupaten Banjarnegara	251,30	232,90	200,60	184,02	166,70	177,30	164,00	166,80	159,50	165,40	158,20
Kabupaten Kebumen	388,70	362,40	334,90	309,61	263,00	279,40	258,50	251,10	242,30	241,90	235,90
Kabupaten Purworejo	162,30	146,00	130,00	121,39	115,30	121,90	112,80	109,00	102,10	101,20	99,10
Kabupaten Wonosobo	257,50	241,40	207,50	194,02	174,70	183,00	169,30	170,10	165,80	166,40	160,10
Kabupaten Magelang	199,10	200,10	190,80	176,49	167,20	179,60	166,20	171,00	160,50	162,40	158,90
Kabupaten Boyolali	184,60	167,00	158,40	148,24	127,80	139,50	129,10	126,50	118,60	120,00	117,00
Kabupaten Klaten	257,40	249,10	243,10	220,18	197,40	203,10	187,90	179,50	168,20	172,30	168,00

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kabupaten Sukoharjo	126,50	113,80	99,10	94,45	90,20	92,00	85,10	84,10	78,90	79,90	78,90
Kabupaten Wonogiri	262,90	237,40	201,10	184,88	145,50	146,40	135,40	132,20	123,80	123,00	124,80
Kabupaten Karanganyar	148,60	138,90	125,90	118,79	113,80	124,50	115,20	114,40	107,30	106,40	107,70
Kabupaten Sragen	201,90	180,70	177,10	167,30	149,70	154,30	142,80	139,00	130,30	130,40	126,80
Kabupaten Grobogan	361,90	330,40	262,00	247,47	233,70	227,80	210,80	199,00	186,50	184,50	184,10
Kabupaten Blora	197,60	176,80	155,10	145,95	134,90	134,90	124,80	123,80	116,00	115,00	113,90
Kabupaten Rembang	188,50	174,30	154,70	147,15	138,50	140,40	129,90	128,00	120,00	119,10	115,50
Kabupaten Pati	256,50	228,80	207,20	184,05	172,40	175,10	162,00	157,90	148,10	147,10	144,20
Kabupaten Kudus	91,60	82,40	97,80	84,86	70,20	73,60	68,10	70,10	65,80	64,10	64,20
Kabupaten Jepara	123,60	111,20	119,20	104,74	111,80	113,30	104,80	106,90	100,50	100,60	100,30
Kabupaten Demak	263,50	238,90	217,20	202,24	198,80	192,50	178,10	172,50	162,00	160,90	158,80
Kabupaten Semarang	120,70	110,10	102,50	96,72	97,90	96,00	88,80	83,20	79,80	81,20	80,70
Kabupaten Temanggung	114,90	115,00	114,70	105,83	95,30	94,90	87,80	91,10	85,50	87,50	87,10

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kabupaten Kendal	198,70	192,70	168,20	152,43	130,40	128,60	119,00	117,70	110,50	109,30	107,80
Kabupaten Batang	134,40	139,80	122,00	112,17	103,60	95,30	88,20	87,50	82,10	83,50	82,60
Kabupaten Pekalongan	190,00	170,00	164,30	151,63	136,60	125,90	116,50	116,50	109,30	112,10	113,30
Kabupaten Pemalang	338,20	307,10	325,20	303,73	251,80	261,20	241,70	246,80	237,00	235,50	227,10
Kabupaten Tegal	289,70	258,60	220,70	195,46	182,50	161,10	149,00	149,80	140,30	143,50	144,20
Kabupaten Brebes	533,10	492,20	459,30	432,40	398,70	394,40	364,90	367,90	355,10	352,00	348,00
Kota Magelang	14,50	13,00	14,90	13,65	12,40	13,10	12,10	11,80	11,00	10,90	10,60
Kota Surakarta	77,60	69,80	83,40	77,97	69,80	64,50	59,70	59,70	55,90	55,70	55,90
Kota Salatiga	15,20	15,60	14,90	14,05	14,20	13,30	12,30	11,50	10,80	10,60	9,70
Kota Semarang	77,80	77,60	89,60	73,14	79,70	88,50	81,90	86,70	84,70	84,30	83,60
Kota Pekalongan	19,90	17,90	28,00	23,34	26,40	28,30	26,80	24,10	23,60	24,10	23,60
Kota Tegal	24,70	22,20	26,80	23,43	25,70	25,90	24,00	21,60	20,90	20,30	20,30

**Sumber: BPS (2017)**

**Lampiran IV**

**Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan per Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2006- 2016**

(Juta Rupiah)

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kabupaten Cilacap	53795	72961	85033	101480	113792	169416	165934	196344	231818	278762	446653
Kabupaten Banyumas	80280	100936	113838	109251	149771	193369	232583	260552	338849	434346	401349
Kabupaten Purbalingga	53935	73799	88389	87875	88990	115564	127327	139488	185003	197795	304091
Kabupaten Banjarnegara	41607	60213	73463	80707	92905	100037	119001	139571	155994	103829	399151
Kabupaten Kebumen	53308	75718	85132	119108	96944	109605	131090	205949	253124	252254	112299
Kabupaten Purworejo	45344	59807	74317	76093	87352	103549	118351	147094	162619	215616	296123
Kabupaten Wonosobo	63337	54974	60847	61759	71432	89959	102077	115208	162384	213878	195214
Kabupaten Magelang	53137	72129	90630	85512	99006	110151	126472	142334	152856	199965	266797
Kabupaten Boyolali	47643	65448	84937	99773	109229	124547	166688	185871	222641	245774	66838
Kabupaten Klaten	41385	54958	67580	73310	67150	76322	81293	88244	170920	208622	240506
Kabupaten Sukoharjo	49381	52.88	65798	70805	86192	98242	106921	131790	167812	248961	159643
Kabupaten Wonogiri	45443	58131	75006	89114	97736	101140	120447	135094	189778	177249	79205
Kabupaten Karanganyar	40140	54812	64191	68845	72532	84511	98490	127500	160924	183227	78837
Kabupaten Sragen	42361	59938	73826	81486	99870	117746	149423	153946	210480	242149	334887
Kabupaten Grobogan	50675	57477	70233	86970	88211	109203	145913	149673	222868	203937	345573
Kabupaten Blora	40733	59872	69373	73187	74937	92511	124462	137788	191271	194379	295687
Kabupaten Rembang	62338	62893	81552	80348	88849	105621	136168	156836	176883	197737	71015
Kabupaten Pati	90024	95473	114055	123597	153943	173489	213382	229752	254197	317439	421024
Kabupaten Kudus	60683	166934	117265	104245	124154	137906	158982	183737	194342	324474	372620
Kabupaten Jepara	52421	70133	89191	95984	95937	121077	145707	169360	178562	242143	283753

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kabupaten Demak	44535	65026	66543	62557	74845	89082	106532	115557	120116	167826	268262
Kabupaten Semarang	67465	85817	89449	113090	116956	123655	146350	188348	229091	247574	335197
Kabupaten Temanggung	35708	51199	56221	31719	77477	83959	89220	110059	135771	191438	196111
Kabupaten Kendal	51148	66778	82259	81886	89732	116872	120289	146791	180360	204139	311773
Kabupaten Batang	30915	48280	64752	74995	73089	88247	102442	133116	155589	124855	233344
Kabupaten Pekalongan	57859	68903	93306	104367	109134	120361	153245	190573	221554	220672	241782
Kabupaten Pemalang	58407	66572	78741	86436	96084	95501	129107	150780	157204	236718	297122
Kabupaten Tegal	61647	70534	76458	103885	107528	122418	152198	180171	257312	310786	177958
Kabupaten Brebes	60013	77356	94697	118986	149060	133684	149390	206765	231708	369045	487972
Kota Magelang	31547	42808	48139	54404	66887	50448	97255	112916	133562	168579	77639
Kota Surakarta	25636	37156	53216	122549	66204	108139	118581	121791	124126	129887	156396
Kota Salatiga	37661	37843	49943	61271	71132	75195	111016	95959	127348	125660	231671
Kota Semarang	63114	88777	105925	131695	148490	158390	70929	250660	266877	247546	528568
Kota Pekalongan	19297	28380	43428	37670	40896	58842	66843	83442	109914	162399	81384
Kota Tegal	50145	65858	69853	81182	80784	104071	133651	157349	179797	233683	278947

**Sumber: BPS (2017)**

## Lampiran V

### Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan per Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2016

(Juta Rupiah)

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kabupaten Cilacap	301739	346661	436589	476631	507961	615548	796468	920165	965177	1154494	1102472
Kabupaten Banyumas	372374	371966	326844	503584	552467	841649	909646	1082757	118085	1301990	1034013
Kabupaten Purbalingga	198987	232301	290275	321010	344245	495613	597521	548938	606590	716770	635052
Kabupaten Banjarnegara	233674	289843	347871	383585	342873	585090	602532	642649	693656	96763	1416880
Kabupaten Kebumen	274676	345810	398465	495295	496844	707766	723605	829733	913820	1055031	167360
Kabupaten Purworejo	190992	227867	317826	385376	408723	548452	610358	616215	688028	773152	684773
Kabupaten Wonosobo	168634	867638	258356	287310	259715	434066	472793	502523	553594	651592	585811
Kabupaten Magelang	257806	325135	381119	443273	438254	647636	791133	863392	953024	994301	735547
Kabupaten Boyolali	275221	316780	358482	451141	488243	624411	600108	678845	758390	854682	180409
Kabupaten Klaten	373487	445541	518043	604038	591939	834955	882665	933642	1039412	1117038	1011690
Kabupaten Sukoharjo	228721	267265	324830	396208	377256	515132	552034	614904	689251	853931	724287
Kabupaten Wonogiri	282524	333018	376986	499092	485169	679430	761471	866099	845674	970036	617340
Kabupaten Karanganyar	225815	263773	329386	389696	375172	502939	601620	742864	869111	881126	129136
Kabupaten Sragen	253304	290358	381981	395938	401946	583058	672156	751932	768481	888130	762821
Kabupaten Grobogan	254741	295611	339188	360913	343770	639148	635214	797204	734020	846549,8	729528

Kabupaten Blora	223366	282686	376052	386799	345969	562543	603878	661423	735884	839824	698827
Kabupaten Rembang	208673	182634	227881	282340	252264	356466	477211	508186	572506	619034	123614
Kabupaten Pati	293622	322553	393966	435488	477099	577163	705089	829073	828586	907399	855367
Kabupaten Kudus	185730	243452	275585	340296	326738	390588	476942	558526	650031	703353	646898
Kabupaten Jepara	199308	754305	322441	348511	321981	468139	586335	608710	644918	770962	466949
Kabupaten Demak	182604	223072	257649	323812	287372	496988	556295	581571	639052	704773	613341
Kabupaten Semarang	210148	267596	298668	344582	341913	437774	460943	445721	452094	692426	686211
Kabupaten Temanggung	162385	197041	223200	283009	277277	334887	430768	452341	494304	563820	17349
Kabupaten Kendal	203506	244142	307430	359515	340363	504171	561553	649990	681717	760449	695793
Kabupaten Batang	145252	199748	241357	263915	251113	372039	470784	457051	448689	68462	505999
Kabupaten Pekalongan	152235	182945	219093	299447	325067	459798	535831	580538	595002	685357	554304
Kabupaten Pemasang	232445	101563	327015	325934	414030	540926	700241	774827	735149	908871	815912
Kabupaten Tegal	249593	291869	359903	419827	411617	624292	642077	681321	756366	941224	112839
Kabupaten Brebes	361356	379459	407627	482929	542642	750916	783166	930998	913057	1028375	914141
Kota Magelang	79770	114931	137717	144883	142707	34215	207933	224974	253698	272227	44694
Kota Surakarta	176706	219667	270598	310534	284538	487616	535444	546251	651021	731422	666858
Kota Salatiga	89393	105457	114829	124459	118919	177439	198132	245797	272479	304519	217151
Kota Semarang	313314	379121	453698	519564	542728	667639	637581	1044601	861446	994255	1068293
Kota Pekalongan	77858	98578	155468	137404	131496	169354	202842	3827	240065	276602	243238
Kota Tegal	68221	127749	132368	171763	128591	163594	224961	251275	214066	337139	304703

Sumber: BPS (2017)



## Lampiran VI

### Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FE

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.197845	(34,346)	0.0000
Cross-section Chi-square	105.204275	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 09/19/18 Time: 22:26

Sample: 2006 2016

Periods included: 11

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 385

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	75.29971	0.550066	136.8921	0.0000
PDRB	-2.41E-13	9.51E-13	-0.253094	0.8003
PEND_MISKIN	-0.026491	0.002435	-10.87782	0.0000
ANG_KESEHATA N	-1.19E-05	3.71E-06	-3.217729	0.0014
ANG_PENDIDIKA	3.53E-06	1.22E-06	2.894354	0.0040

N

---

---

R-squared	0.243242	Mean dependent var	71.33954
Adjusted R-squared	0.235276	S.D. dependent var	4.852316
S.E. of regression	4.243277	Akaike info criterion	5.741451
Sum squared resid	6842.053	Schwarz criterion	5.792792
Log likelihood	-1100.229	Hannan-Quinn criter.	5.761813
F-statistic	30.53552	Durbin-Watson stat	0.901397
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

---

Sumber: E Views 9

## Lampiran VII

### Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RE

Test cross-section random effects

---

---

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.520946	4	0.4747

---

---

Cross-section random effects test comparisons:

---

---

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB	0.000000	-0.000000	0.000000	0.5489
PEND_MISKIN	-0.032927	-0.026746	0.000073	0.4701
ANG_KESEHATA N	-0.000015	-0.000013	0.000000	0.4294
ANG_PENDIDIKA N	0.000003	0.000003	0.000000	0.5183

---

---

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 09/19/18 Time: 22:27

Sample: 2006 2016

Periods included: 11

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 385

---

---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	76.95900	1.910657	40.27882	0.0000
PDRB	1.76E-14	9.11E-13	0.019364	0.9846
PEND_MISKIN	-0.032927	0.009271	-3.551678	0.0004
ANG_KESEHATA N	-1.45E-05	4.07E-06	-3.564578	0.0004
ANG_PENDIDIKA N	2.84E-06	1.56E-06	1.821758	0.0694

---

---

Effects Specification

---

---

Cross-section fixed (dummy variables)

---

---

R-squared	0.424186	Mean dependent var	71.33954
Adjusted R-squared	0.360946	S.D. dependent var	4.852316
S.E. of regression	3.878984	Akaike info criterion	5.644816
Sum squared resid	5206.094	Schwarz criterion	6.045275
Log likelihood	-1047.627	Hannan-Quinn criter.	5.803640
F-statistic	6.707578	Durbin-Watson stat	1.183696
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

---

Sumber: E Views 9

## Lampiran VIII

### *Random Effect*

Dependent Variable: IPM

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 09/19/18 Time: 22:17

Sample: 2006 2016

Periods included: 11

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 385

Swamy and Arora estimator of component variances

---

---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	75.58248	0.814564	92.78884	0.0000
PDRB	-7.53E-14	8.98E-13	-0.083946	0.9331
PEND_MISKIN	-0.026746	0.003566	-7.500600	0.0000
ANG_KESEHATA N	-1.33E-05	3.79E-06	-3.518489	0.0005
ANG_PENDIDIKA N	3.40E-06	1.28E-06	2.649885	0.0084

---

---

#### Effects Specification

---

---

	S.D.	Rho
Cross-section random	1.773796	0.1729
Idiosyncratic random	3.878984	0.8271

---

---

#### Weighted Statistics

---

---

R-squared	0.139140	Mean dependent var	39.26998
-----------	----------	--------------------	----------

---

---

Adjusted R-squared	0.130079	S.D. dependent var	4.156273
S.E. of regression	3.876538	Sum squared resid	5710.468
F-statistic	15.35482	Durbin-Watson stat	1.081101
Prob(F-statistic)	0.000000		

---



---

Unweighted Statistics

---



---

R-squared	0.242289	Mean dependent var	71.33954
Sum squared resid	6850.671	Durbin-Watson stat	0.901166

---



---

Sumber: E Views 9

